



KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

NOMOR : 21 TAHUN 2016

T E N T A N G

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PENYEMPURNAAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH DAN PERUBAHAN PERATURAN DPRD KABUPATEN
CIREBON NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

- Menimbang : a. bahwa untuk memperoleh efisiensi dan efektifitas dalam penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon dan Perubahan Tata Tertib DPRD Kabupaten Cirebon, dipandang perlu membentuk Panitia khusus;
- b. bahwa Pembentukan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Diundangkan dalam Berita Negara Tahun 1950 tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
5. Peraturan DPRD Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DPRD TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH DAN PERUBAHAN TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON.

PERTAMA : Membentuk Panitia Khusus untuk membahas, meneliti dan menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah dan Perubahan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dengan susunan personalia dan materi garapan sebagai berikut :

PANITIA KHUSUS I

A. SUSUNAN PERSONALIA :

I. KOORDINATOR PANITIA KHUSUS I :

- | | |
|------------------------------|------------------|
| 1. Hj. YUNINGSIH, MM | Wakil Ketua DPRD |
| 2. SUNANDAR PRIYOWUDARMO, SE | Wakil Ketua |

II. ANGGOTA PANITIA KHUSUS I :

- | | |
|---------------------------------|-------------|
| 1. H. MUNTAKHOBUL FUAD, M.Pd | Ketua |
| 2. BEJO KASIYONO | Wakil Ketua |
| 3. MUKLISIN NALAHUDIN, SH. MH | Sekretaris |
| 4. AAN SETYAWAN, S.Si | Anggota |
| 5. H. YOYO SISWOYO | Anggota |
| 6. Hj. AMENAH, SE | Anggota |
| 7. SOPHI ZULFIA, SH. MH | Anggota |
| 8. MOH. FAHRUROZI, MA | Anggota |
| 9. ROSID | Anggota |
| 10. H. SUGIARTO | Anggota |
| 11. SOFATILAH, SH | Anggota |
| 12. Hj. ERYATI | Anggota |
| 13. Drs. H. AN IM FALAKHUDIN | Anggota |
| 14. H. KHANAFI, SH | Anggota |
| 15. Hj. NINING NURHAESIH, M.Pdi | Anggota |
| 16. AHMAD FAWAZ, S.Tp | Anggota |
| 17. AHMAD AIDIN TAMIM | Anggota |
| 18. NOVA FIKROTUSHOFIYAH, Lc | Anggota |
| 19. TARSENI | Anggota |
| 20. H. TARMIDI | Anggota |
| 21. JUANSIH | Anggota |
| 22. WARTIPAN SUWANDA, SH | Anggota |
| 23. DEWI FATMAWATI, SH | Anggota |

B. MATERI GARAPAN :

1. Rancangan PERDA tentang Kerjasama Daerah.
2. Rancangan PERDA tentang Pengelolaan Investasi Di Kabupaten Cirebon

PANITIA KHUSUS II

A. SUSUNAN PERSONALIA :

I. KOORDINATOR PANITIA KHUSUS II :

- | | |
|-------------------|------------------|
| 1. H. MUSTOFA, SH | Ketua DPRD |
| 2. Drs. H. SUBHAN | Wakil Ketua DPRD |

II. ANGGOTA PANITIA KHUSUS II :

- | | |
|-------------------------------------|-------------|
| 1. SUHERMAN | Ketua |
| 2. ZENAL ARIFIN WA'UD, M.Si | Wakil Ketua |
| 3. SOFWAN, ST | Sekretaris |
| 4. CARILA ROHANDI | Anggota |
| 5. RUDIANA, SE | Anggota |
| 6. H. AGUS KURNIAWAN | Anggota |
| 7. Hj. DIAN HERNAWA SUSANTY | Anggota |
| 8. PANDI, SE | Anggota |
| 9. H. TANUNG | Anggota |
| 10. H. MULUS TRISLA AGENG, SE | Anggota |
| 11. R. CAKRA SUSENO, SH | Anggota |
| 12. Drs. H. RASIDA EDY PRIYATNA, MM | Anggota |
| 13. DIAH IRWANY INDRIYATI, S.Ap | Anggota |
| 14. WAHIDIN L, Sip | Anggota |
| 15. JUNAEDI, ST | Anggota |
| 16. TOIF, S.Pd | Anggota |
| 17. H. AKYAS SAFITRI, S.Sos | Anggota |
| 18. Hj. IROH ROHAYATI | Anggota |
| 19. DINAH WARDINAH | Anggota |
| 20. SUKARYADI, SE | Anggota |
| 21. Dra. TATI SUAHAETI | Anggota |
| 22. SUPIRMAN, SH | Anggota |
| 23. HERMANTO, SH | Anggota |

B. MATERI GARAPAN :

1. Rancangan PERDA tentang Perubahan Atas Perda Nomor 17 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Cirebon Tahun 2011 – 2031.
 2. Rancangan Peraturan DPRD Kabupaten Cirebon tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Cirebon.
-

- KEDUA : Tugas Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA yaitu :
- a. Menampung usul, pendapat dan saran Anggota DPRD dalam pembahasan Pansus;
 - b. Menyelesaikan segala permasalahan yang memerlukan perhatian dan penelitian khusus guna menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana termaksud pada diktum PERTAMA.
- KETIGA : Panitia Khusus melaporkan hasil kerja penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah kepada Pimpinan DPRD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Khusus diberikan sampai dengan persetujuan DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah tersebut menjadi Peraturan Daerah.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal, 31 Agustus 2016



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Sdr. Bupati Cirebon;
3. Yth. Anggota DPRD Kabupaten Cirebon.